

# TINGKAT PENDIDIKAN PEREMPUAN INDONESIA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA TAHUN 1970 -1998

Oleh: **Nur'aeni Marta**  
Dosen Sejarah FIS UNJ

---

## **Abstrak**

*Rendahnya tingkat pendidikan perempuan Indonesia merupakan hasil dari masih rendahnya kesempatan dan partisipasi perempuan dalam bidang pendidikan pada masa sebelumnya. Memang sejak tahun 1980-an nampak adanya peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang pendidikan. Hal ini dikarenakan sejak tahun 1973 telah dibangun SD INPRES di berbagai daerah Indonesia, dengan tujuan pemerataan pendidikan. kemudian pada tahun 1984 dilanjutkan dengan kebijakan wajib belajar 6 tahun dan tahun 1994 ditingkatkan menjadi wajib belajar 9 tahun. Namun kenyataannya kebijakan tersebut belum secara signifikan menyetarakan jumlah partisipasi perempuan dan laki-laki dalam bidang pendidikan. Tingkat pendidikan wanita Indonesia yang mayoritas rendah ini berpengaruh pada tingkat kesempatan memperoleh pekerjaan. Pada tahun 1990-an sebagian besar tenaga kerja perempuan Indonesia terserap pada sektor informal. Pekerjaan pada sektor ini sangat rawan akan tindakan kekerasan, karena hubungan kerja pada sektor ini lebih bersifat subjektif, tergantung pada hubungan individu dan tidak ada jaminan keselamatan bagi pekerjanya.*

## **Kata kunci:**

*tingkat pendidikan perempuan, ketenagakerjaan, kesetaraan*

---

## **Pendahuluan**

Pendidikan merupakan kebutuhan setiap manusia, sehingga kesempatan memperoleh pendidikan tidak dibatasi oleh jenis kelamin, perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama. Untuk itu seharusnya tingkat pendidikan perempuan di Indonesia setara dengan tingkat pendidikan laki-laki. Namun kenyataan menunjukkan bahwa tingkat pendidikan perempuan di Indonesia secara umum lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Bahkan sampai tahun 2009 data-data menunjukkan bahwa tingkat

pendidikan dan jumlah perempuan yang berpendidikan tinggi di Indonesia masih rendah dan jumlahnya jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah laki-laki.

Padahal menurut UUD 1945 pasal 31 menyatakan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara Indonesia. Perempuan adalah bagian dari warga negara sehingga mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam memperoleh pendidikan.

Rendahnya tingkat pendidikan perempuan Indonesia merupakan hasil dari kesempatan dan partisipasi

perempuan dalam bidang pendidikan pada masa sebelumnya. Memang sejak tahun 1980-an nampak adanya peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang pendidikan. Hal ini dikarenakan sejak tahun 1973 telah dibangun SD INPRES di berbagai daerah Indonesia, dengan tujuan pemerataan pendidikan. Kemudian pada tahun 1984 dilanjutkan dengan kebijakan wajib belajar 6 tahun dan tahun 1994 ditingkatkan menjadi wajib belajar 9 tahun. Namun kenyataannya kebijakan tersebut belum secara signifikan menyetarakan jumlah partisipasi perempuan dan laki-laki dalam bidang pendidikan.

Pada tahun 1980-an nampak adanya perkembangan partisipasi perempuan dalam bidang pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan dasar. Pada jenjang tingkat pendidikan dasar ini hampir tidak tampak adanya perbedaan gender, jumlah anak perempuan yang mengenyam pendidikan dasar ini hampir sama dengan jumlah anak laki-laki. Sedangkan pada tingkat lebih lanjut terdapat ketidaksetaraan pendidikan laki-laki dan perempuan. Setidaknya sampai tahun 1998, data-data menunjukkan bahwa jenjang pendidikan perempuan Indonesia secara progresif mengalami kesenjangan menurut gender. Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin tinggi pula tingkat kesenjangannya. Jumlah perempuan Indonesia yang berpendidikan tinggi secara umum jumlahnya relatif lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah laki-laki. Tingkat pendidikan wanita Indonesia yang mayoritas rendah ini berpengaruh pada tingkat kesempatan

memperoleh pekerjaan. Pada tahun 1990-an sebagian besar tenaga kerja perempuan Indonesia terserap pada sektor informal. Pekerjaan pada sektor ini sangat rawan akan tindakan kekerasan, karena hubungan kerja pada sektor ini lebih bersifat subjektif, tergantung pada hubungan individu dan tidak ada jaminan keselamatan bagi pekerjaanya.

Realita menunjukkan bahwa mayoritas tingkat pendidikan wanita di Indonesia masih rendah. Berdasarkan data kependudukan tahun 2009 bahwa tingkat pendidikan perempuan Indonesia secara umum masih rendah. Kondisi ini berimplikasi pada kualitas sumber daya manusia Indonesia. perempuan merupakan bagian dari suatu masyarakat yang mempunyai peranan penting dalam berbagai kehidupan, termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga seorang perempuan merupakan sumber daya manusia yang potensial sebagai modal dasar pembangunan suatu bangsa. Oleh karenanya perempuan sebagai sumber daya manusia masih belum diberdayakan secara optimal dalam pembangunan.

Rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas pendidikan perempuan pada masa sekarang ini tidak lepas dari hasil pendidikan perempuan yang ditempuh pada masa-masa sebelumnya. Untuk itu menurut Mochtar Buchori bahwa setiap pendidikan seyogjanya bersifat antisipatoris, yaitu pendidikan yang mampu mempersiapkan peserta didik untuk mengarungi kehidupan di masa

depan<sup>1</sup>. Dengan kata lain, pendidikan dapat dikatakan juga sebagai investasi untuk masa depan. Oleh karenanya pendidikan sangat menentukan nasib seseorang di masa depan. Tingkat pendidikan biasanya menentukan keberhasilan seseorang dalam persaingan di bidang sosial, politik dan ekonomi. Oleh karenanya perempuan Indonesia yang secara umum tingkat pendidikannya rendah mengakibatkan mereka termarginalkan dalam berbagai bidang.

Ketertinggalan perempuan Indonesia dalam bidang pendidikan adalah suatu ironi, karena di masa pemerintah Orde Baru orientasi kebijakannya pada pembangunan di segala bidang termasuk bidang pendidikan. Pada masa Orde Baru, pemerintah telah membuka kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memperoleh pendidikan. Pada tahun 1973, pemerintah Orde Baru melalui Program Instruksi Presiden No. 10 tahun 1973, melakukan perluasan dan pemerataan kesempatan belajar sekolah dasar. Kemudian pada tahun 1984 pemerintah Orde Baru mengeluarkan kebijakan wajib belajar 6 tahun bagi anak usia 7-12, dan pada tahun 1994 ditingkatkan menjadi wajib belajar 9 tahun bagi anak usia 7-15 tahun. Namun kenyataannya, perempuan Indonesia terutama antara tahun 1970-1998 menunjukkan mayoritas tingkat pendidikan masih rendah. Kondisi ini mengindikasikan ada faktor-faktor lain yang menghambat kesempatan perempuan memperoleh pendidikan yang sama

dengan laki-laki. Berdasarkan data-data yang diperoleh ternyata budaya masyarakat Indonesia yang patriarki merupakan salah satu faktor yang menentukan kesempatan perempuan memperoleh pendidikan. Untuk itu, tulisan ini diawali dengan pembahasan mengenai kedudukan perempuan Indonesia dalam Masyarakat, partisipasi perempuan dalam bidang pendidikan dan perkembangan tingkat pendidikannya, kemudian dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja. Tulisan ini dimaksudkan mendeskripsikan bagaimana perkembangan tingkat pendidikan perempuan Indonesia dan dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja antara tahun 1970-1998. Sehingga memberikan wawasan dan merekomendasikan bahwa pentingnya pendidikan bagi perempuan, karena perempuan adalah bagian dari aset sumber daya manusia yang potensial bagi negara.

## **B. Kedudukan Perempuan Indonesia Dalam Masyarakat Tahun 1970-1998**

Partisipasi perempuan dalam bidang pendidikan tidak lepas dari sosial budaya masyarakatnya. Budaya patriarki yang sangat kuat melekat dikalangan masyarakat Indonesia, menyebabkan terjadinya diskriminasi kedudukan perempuan dalam pergaulan di masyarakat. Masyarakat Indonesia secara umum menganggap kedudukan perempuan lebih rendah dibandingkan dengan kedudukan laki-laki. Masyarakat menganggap bahwa laki-laki adalah kepala keluarga dan pencari nafkah utama keluarga. Sementara perempuan adalah

---

<sup>1</sup> Mochtar Buchori, Pendidikan Antisipatoris, (Jakarta: Kanisius, 2001 ) hlm. 20

pendamping/*konco wingking* sehingga bukan pencari nafkah utama keluarga. Anggapan seperti ini menciptakan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, yaitu laki-laki berperan diranah publik sementara perempuan berperan di ranah domestik.

Kedudukan perempuan sebagai pendamping/*konco wingking* dan dianggap bukan sebagai penghasil utama keluarga ini mengakibatkan aktivitasnya lebih diarahkan pada kegiatan *domestik*, yaitu sebagai pengurus rumah tangga, sehingga masyarakat menganggap perempuan tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi, berbeda dengan laki-laki yang memerlukan pendidikan yang tinggi agar mereka bisa eksis memegang peranannya di ranah publik.

Kondisi ini sebenarnya tidaklah relevan dengan apa yang telah diamanahkan dalam UUD 1945. Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dinyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan *pengajaran*. Berdasarkan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa kedudukan laki-laki dan wanita sebagai warga negara dan masyarakat sosial adalah sama. Selain itu juga dalam pasal 31 UUD 1945 tersebut mengandung arti bahwa baik laki-laki maupun perempuan masing-masing mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pendidikan formal.

Pada tahun 1970-1998 merupakan bagian dari masa pemerintahan Orde Baru, yang mana lebih menekankan adanya stabilitas politik dan keamanan sebagai upaya menunjang keberhasilan

pembangunan. Guna menjaga dan memacu pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah Orde Baru sangat memperhitungkan keterlibatan kaum perempuan. Kedudukan perempuan kemudian diatur dan dituangkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Di dalam GBHN disebutkan mengenai peranan perempuan dalam pembangunan yang dirumuskan dalam panca tugas perempuan. Dalam GBHN tersebut dinyatakan bahwa, tugas seorang perempuan adalah sebagai pendamping suami, pendidik dan pembina generasi muda, pengatur rumah tangga, tenaga kerja, dan anggota organisasi masyarakat terutama organisasi wanita. Di sini tampak bahwa program-program pembangunan dan norma-norma yang disusun bagi perempuan lebih menekankan keterampilan yang diperlukan pada ranah *domestik* (rumah tangga).

Pandangan-pandangan yang bersumber pada nilai sosial budaya yang *patriarkhis* juga mempengaruhi pertimbangan orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah yang lebih tinggi. Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin mahal biaya untuk bersekolah. Tingginya biaya ini menjadi hambatan kaum perempuan untuk melanjutkan sekolah, terutama bagi keluarga yang miskin. Keadaan ini mendorong orang tua lebih memilih untuk menyekolahkan anak laki-lakinya dibandingkan anak perempuan. Kondisi ini nampak pada data-data statistik yang menunjukkan rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam pendidikan jika dibandingkan dengan

laki-laki. Perbedaan tingkat partisipasi antara perempuan dan laki-laki semakin nyata pada kelompok umur yang lebih tinggi, sebagai contoh pada tahun 1985, penduduk laki-laki yang masih sekolah pada usia 19-24 tahun dua kali lipat lebih besar dibanding perempuan<sup>2</sup> Kedudukan perempuan dalam masyarakat Indonesia yang demikian mengakibatkan posisi wanita Indonesia secara umum termarginalkan termasuk dalam bidang pendidikan.

### **C. Partisipasi Wanita Dalam Bidang Pendidikan**

Secara umum partisipasi perempuan dalam bidang pendidikan lebih diarahkan untuk mempersiapkan diri di ranah domestik. Sebagaimana telah diuraikan diatas, perempuan yang dianggap mempunyai perasaan dan naluri yang lebih halus dibanding laki-laki, sehingga melahirkan pembagian tugas berdasarkan biologis. Wanita dianggap lebih cocok mengurus anak-anak dan mengurus rumah tangga, sedangkan laki-laki yang dianggap mempunyai fisik lebih kuat, sehingga peranan laki-laki dalam masyarakat Indonesia adalah sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.

Hal ini mengakibatkan kehidupan wanita berputar di sekitar kehidupan rumah tangga. Tujuan hidup perempuan seakan-akan hanyalah untuk menikah dan membangun rumah tangga. Kondisi seperti ini sangat terasa terutama di daerah pedesaan. Sebagai contoh, di daerah Gegecik kabupaten Cirebon

pada tahun 1970-an sampai tahun 1990-an, bagi anak gadis yang sudah berumur antara 12 sampai dengan 16 tahun belum ada laki-laki yang melamar untuk menikah, maka orang tua dan anak perempuannya akan menanggung malu karena anaknya akan dianggap sebagai “perawan tua”. Bahkan beberapa tokoh masyarakat di daerah kabupaten Cirebon memperlakukan perbedaan antara anak laki-laki dengan anak perempuan dalam mengenyam pendidikan, mereka lebih mengutamakan anak laki-lakinya dibanding anak perempuan. Anak laki-laki diperbolehkan melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi sementara anak perempuan cukup mengenyam pendidikan sekolah dasar dan setelah lulus segera dinikahkan. Dengan demikian terdapat perbedaan perlakuan pada anak perempuan dalam hal kesempatan memperoleh pendidikan dibandingkan dengan anak laki-laki. Anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi, karena kewajiban mereka adalah mengurus rumah tangga. Secara umum sejak kecil anak-anak wanita telah didasarkan atas kewajibannya apabila mereka menikah. Sebagai persiapan, mereka memperoleh pendidikan yang sesuai dengan kedudukannya sebagai ibu rumah tangga. Sedangkan anak laki-laki disekolahkan sebagai persiapan memperoleh suatu profesi.

Pandangan masyarakat demikian melahirkan anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, karena wanita hanya sebagai pendamping laki-laki dan dibawah “tanggung jawab” laki-laki. Kaum laki-lakilah yang dianggap

---

<sup>2</sup> Statistik Indonesia 1987, Jakarta : Biro Pusat Statistik, 1987. Hlm 103

sebagai kepala keluarga. Peranannya sebagai kepala keluarga sehingga kaum laki-laki dituntut untuk mendapat pendidikan yang lebih baik agar mendapat pekerjaan yang lebih baik pula, dengan demikian mereka dapat menghidupi dan mencukupi kebutuhan keluarganya. Akhirnya, banyak kaum perempuan terutama di pedesaan yang kemudian tidak melanjutkan pendidikannya. Jika sudah lulus sekolah dasar, maka sudah dianggap cukup dan yang penting bisa membaca.

Pada tahun 1984 nampak adanya peningkatan partisipasi perempuan dalam pendidikan, terutama setelah dikeluarkannya kebijakan wajib belajar oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah mengenai wajib belajar 6 tahun yang dikeluarkan pada tahun 1984 kemudian diperkuat dengan adanya peraturan pemerintah tentang wajib belajar 9 tahun yang bertujuan memperluas kesempatan bagi kaum wanita Indonesia untuk memperoleh pendidikan dasar. Selain itu membuka kesempatan bagi wanita yang mempunyai kemampuan untuk melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Namun, adanya beberapa hambatan yang dialami wanita Indonesia akibat dari tradisi budaya *patriarkhis*, menyebabkan wanita Indonesia banyak mengalami putus sekolah. Sehingga kebijakan wajib belajar hanya mampu meningkatkan partisipasi perempuan dalam pendidikan tingkat dasar. Sementara partisipasi perempuan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi jumlahnya masih sedikit. Baru kemudian sejak tahun 1990-an

terutama setelah diberlakukan wajib belajar 9 tahun pada tahun 1994 terjadi peningkatan jumlah partisipasi perempuan dalam bidang pendidikan.

#### D. Tingkat Pendidikan wanita

Indonesia antara tahun 1970 - 1998

Tonggak penting pembangunan pendidikan setelah kemerdekaan di Indonesia adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954. Undang-undang ini merupakan dasar hukum Sistem Pendidikan Nasional yang pertama yang dilegalkan. Dalam perkembangan kehidupan bangsa, pada masa Orde Baru, Sistem Pendidikan Nasional diatur ulang dengan dilakukan perubahan yang tertuang dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 1989. Undang-undang sistem pendidikan ini kemudian terus digunakan sampai akhir masa Orde Baru.

Dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia dinyatakan bahwa pendidikan nasional merupakan alat dan sekaligus tujuan yang sangat penting dalam perjuangan mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Hal ini terutama jika dikaitkan dengan peran dan fungsi pendidikan nasional dalam pelaksanaan pembangunan bangsa. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Berdasarkan data statistik dari tahun 1971 sampai dengan tahun 1997 menunjukkan adanya peningkatan jumlah wanita dalam bidang pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan adanya penurunan angka buta aksara kaum wanita usia 10 tahun keatas, yaitu dari 49,7 % pada tahun 1971 menjadi 21,3% pada tahun 1990.<sup>3</sup> Keikutsertaan atau partisipasi wanita bersekolah, khususnya sekolah dasar, hampir seimbang dengan murid laki-laki. Sedangkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi proporsi murid wanita juga meningkat meskipun proporsi murid laki-laki masih lebih besar, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3: Banyaknya Penduduk Usia 7-24 Tahun Yang Masih Sekolah Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin tahun 1971 -1985**

Jenis Kelamin dan Kelompok Umur	Tahun 1971	Tahun 1980	Tahun 1981	Tahun 1982	Tahun 1983	Tahun 1984	Tahun 1985
<b>Laki-laki</b>							
7 - 12 tahun	51 735 23	91 86879	95 003 19	98 096 74	101 218 80	104 171 15	106 986 09
13 – 15 tahun	14 750 56	31 70391	32 935 23	34 140 77	35 371 81	36 639 09	37 943 70
16 – 18 tahun	15 882 25	17 49892	18 253 76	19 137 43	20 021 27	20 927 26	21 911 07
19 – 24 tahun	16 311 29	11 24125	11 712 46	12 197 48	12 696 67	13 210 39	13 739 01
<b>Wanita</b>							
7 – 12 tahun	45 752 70	88 679 60	91 599 90	94 581 10	97 470 50	100 196 96	102 805 62
13 – 15 Tahun	10 024 33	26 718 41	27 863 21	29 028 41	30 213 86	31 378 01	32 636 61
16 -18 tahun	3 028 05	10 872 43	11 505 75	12 194 84	12 869 82	13 611 27	14 372 54
19 – 24 tahun	769 99	4 760 86	5 012 80	5 359 66	5 716 65	5 993 23	6 369 72

Berdasarkan tabel di atas, nampak setiap tahun terjadi peningkatan jumlah wanita yang mengenyam pendidikan pada setiap jenjang tingkat pendidikan sekolah. Namun jika dibandingkan dengan tingkat pendidikan laki-laki, tingkat pendidikan wanita Indonesia secara umum masih rendah. Penyebabnya bukan semata-mata ketidakmampuan menjangkau biaya pendidikan, melainkan juga karena kurangnya akses serta pengaruh lingkungan keluarga. Sebagian masyarakat Indonesia, masih ada yang beranggapan wanita sebaiknya fokus mengurus keluarga. Wanita tidak perlu mempunyai pendidikan tinggi, cukup di tingkat SD dan SMP. Sehingga pada tingkat pendidikan dasar jumlah partisipasi wanita Indonesia hampir sama banyaknya dengan jumlah partisipasi laki-laki. Sementara pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi jumlah partisipasi wanita semakin menurun jumlahnya.

<sup>3</sup> Data statistik tahun 1990

Berdasarkan data statistik menunjukkan telah terjadi peningkatan jumlah peserta didik tingkat sekolah dasar sebesar 227%, yaitu dari jumlah 13 juta pada awal Pelita I meningkat menjadi 29,5 juta pada tahun 1994. Pada tingkat SLTP, jumlah peserta didik naik dari 1,5 juta pada awal Pelita I menjadi 6,98 juta pada akhir Pelita V. Pada tingkat SLTA selama pembangunan jangka panjang pertama jumlah peserta didik mengalami kenaikan juga. Pada awal Pelita I, jumlah peserta didik sebanyak 0,7 juta meningkat menjadi hampir empat kali lipat yaitu sebanyak 4,1 juta (SLTA Umum, Kejuruan, dan Madrasah Aliyah) bahkan di tingkat perguruan tinggi menunjukkan peningkatan yang tajam, yaitu dari 156.000 pada tahun 1968 menjadi 2,1 juta pada akhir Pelita V atau sebanyak 14 kali lipatnya.<sup>4</sup>

Ditinjau dari kesetaraan jumlah murid antara laki-laki dan wanita terdapat perbedaan. Jumlah murid perempuan relatif masih sedikit jika dibandingkan jumlah murid laki-laki. Pada tahun 1971, anak perempuan yang tidak sekolah berjumlah 57% , yang tidak tamat sekolah dasar sebanyak 21,2%, yang tamat SD sebanyak 16,5%, sedangkan yang berhasil menamatkan pendidikan menengah sebanyak 5,1% dan pendidikan lanjutan sebanyak 0,2%. Sementara anak laki-laki yang tidak sekolah pada tahun 1971 sebanyak 32,4%, tidak tamat SD sebanyak 29,4%, yang berhasil menamatkan Sekolah Dasar sebanyak 27,1%, pendidikan menengah sebanyak

10,4%, dan pendidikan lanjutan sebanyak 0,7%. Sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini:

**Tabel : Perolehan Pendidikan Berdasarkan Gender Tahun 1961 - 1990<sup>5</sup>**

Jenis kelamin	Thn	Prosentase dari populasi				
		Tdk Sekolah	Tdk Tamat SD	Tamat SD	Pendi dikan Menengah	Pendi dikan Tinggi
Laki-laki	961	55,7	22,6	16,7	4,8	0,2
	971	32,4	29,4	25,5	10,4	0,7
	980	21,8	35,9	27,1	15,9	0,9
	990	12,2	24,3	32,2	29,2	2,1
Wanita	961	79,6	11,2	<b>7,3</b>	1,9	k.s
	971	57,0	21,2	16,5	5,1	0,2
	980	41,4	24,9	18,8	9,1	0,3
	990	25,4	30,4	28,1	20,6	1,0

Berdasarkan data tabel tersebut dapat dikatakan bahwa sejak tahun 1971 telah terjadi peningkatan rasio tingkat pendaftaran masuk sekolah untuk semua kelompok umur. Selama periode 1971-1980, dan sampai tahun 1990 telah terjadi peningkatan partisipasi kelompok umur 8-11 tahun untuk mendaftar pada tingkat pendidikan dasar. Selain itu jumlah penduduk yang sekolah di perguruan tinggi naik lebih cepat dibandingkan tahun 1960-an. Namun demikian, jika ditinjau dari sisi gender, terdapat perbedaan tingkat pendidikan laki-laki dan perempuan.

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan kesempatan

<sup>55</sup> Keterangan: k.s (kecil sekali/diabaikan) . dan catatan : pendidikan dasar merupakan tingkat pendidikan yang utuh pada jenjang tersebut. Sementara tingkat pendidikan menengah meliputi SLTP dan SLTA, dan pendidikan tinggi meliputi pendidikan tingkat Diploma dan Sarjana. Data berkenaan dengan populasi usia 15 tahun ke atas.

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998: 37-38

yang sama bagi anak wanita dengan anak laki-laki untuk memperoleh pendidikan, tetapi dapat dikatakan bahwa terdapat kesenjangan yang progresif berdasarkan gender pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin sedikit wanita yang menamatkan studinya di masing-masing jenjang dibandingkan dengan jumlah laki-laki. Jadi semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin rendah pula rasio gender.

Pada tahun 1986 jumlah anak laki-laki lulus SLTP sebanyak 4.246.484 pada tahun 1990 meningkat menjadi 5.591.113 orang, pada tahun 1996 menjadi 7.965.276 orang dan tahun 1997 menjadi 9.037.862 orang. dengan demikian nampak ada perkembangan yang progresif. Sementara perkembangan tingkat pendidikan kaum wanita lebih lambat. Pada tahun 1986 wanita yang tamat SLTP berjumlah 1.460.242 orang, pada tahun 1990 meningkat menjadi 2.005.278 orang, pada tahun 1996 meningkat menjadi 3.467.287 orang, dan pada tahun 1997 meningkat menjadi 4.144.576 orang. Sebagaimana digambarkan pada tabel berikut ini;

**Tabel 5: Tingkat Pendidikan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 1986 S.D. 1997**

Tingkat Pendidikan	1986	1990	1996	1997
<b>Laki-laki</b>				
SD	31.599.553	33.392.613	33.669.019	33.719.077
SLTP	4.246.484	5.591.113	7.965.276	9.037.862
SLTA	4.456.698	6.079.872	10.375.801	11.550.956
PT	715.926	1.052.886	2.187.271	2.453.716
<b>Total</b>	<b>41.018.661</b>	<b>46.116.484</b>	<b>54.197.367</b>	<b>56.761.611</b>
<b>Perempuan</b>				
SD	22.017.157	24.201.241	24.373.524	24.900.306

SLTP	1.460.242	2.005.278	3.467.287	4.144.576
SLTA	1.740.907	2.584.642	4.972.021	5.472.889
PT	237.279	443.978	1.176.573	1.455.550
<b>Total</b>	<b>26.455.585</b>	<b>29.235.139</b>	<b>33.989.405</b>	<b>35.973.321</b>

Dari Sakernas tahun 1986-2002 , dapat dikatakan rasio tingkat pendidikan perempuan dan laki-laki pada setiap jenjang pendidikan adalah sebagai berikut; pada tingkat pendidikan dasar di tahun 1986 rasio perbandingan laki-laki dan perempuan sekitar 3 laki-laki berbanding 2 perempuan, di tahun 1990 sekitar 13 berbanding 10 perempuan, di tahun 1996 dan tahun 1997 perbandingannya tetap, yaitu sekitar 13 laki-laki berbanding 10 perempuan.

Sementara pada jenjang pendidikan SLTP rasio perbandingan laki-laki dan perempuan di tahun 1986 sampai dengan tahun 1996 hampir sama yaitu sekitar 3 laki-laki berbanding 1 perempuan, pada tahun 1997 nampak terjadi penurunan angka perbandingan yaitu sekitar 2 laki-laki berbanding 1 wanita. Pada tingkat SLTA rasio perbandingan laki-laki dan perempuan pada tahun 1986 sebesar 4 berbanding 1.

Namun antara tahun 1990 sampai dengan 1997 menunjukkan angka perbandingan yang tetap yaitu sekitar dua berbanding satu. Pada jenjang Pendidikan Tinggi (PT) rasio perbandingan laki-laki dan perempuan pada tahun 1986 sampai dengan tahun 1990 sekitar tiga berbanding satu. Sementara tahun 1996 sampai dengan tahun 1997 sekitar dua berbanding satu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan perempuan Indonesia secara umum mengalami perkembangan, walaupun nampak masih ada kesenjangan

gender antara laki-laki dan perempuan pada setiap jenjang tingkat pendidikan sekolah.

#### **D. Pengaruh Tingkat Pendidikan Perempuan Indonesia Terhadap Kesempatan Kerja Tahun 1971-1997**

Kesempatan kerja mengandung pengertian lapangan pekerjaan dan lowongan kerja yang tercipta untuk diisi melalui suatu kegiatan ekonomi (produksi). Dengan kata lain kesempatan kerja adalah mencakup lapangan pekerjaan yang sudah diisi dan semua lowongan pekerjaan yang belum diisi. Sementara lowongan kerja mengandung arti adanya kesempatan, untuk diisi dan inilah yang disebut kebutuhan tenaga kerja. Biasanya kesempatan kerja sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan seseorang.

Pendidikan merupakan sarana peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia. Oleh karenanya tingkat pendidikan seseorang sangat berpengaruh terhadap kesempatan kerja, semakin tinggi pendidikannya, kesempatan memperoleh pekerjaan pun semakin luas. Dengan demikian perluasan kesempatan pendidikan bagi seluruh warga negara dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tenaga kerja merupakan sumber daya manusia dan menjadi faktor yang terpenting dalam proses pembangunan, khususnya dalam kegiatan ekonomi. Sementara penyediaan tenaga kerja sifatnya terbatas, karena tidak semua

penduduk merupakan tenaga kerja. Di Indonesia hanya penduduk yang telah mencapai 10 tahun atau lebih yang dianggap sebagai angkatan kerja. Selain itu tidak semua angkatan kerja terlibat dalam kegiatan ekonomi. Yang terlibat dalam kegiatan ekonomi adalah mereka yang bekerja dan berpartisipasi aktif dalam dunia kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki dan perempuan di Indonesia tampak adanya perbedaan. Umumnya partisipasi angkatan kerja laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan.

Di Indonesia, secara umum laki-laki merupakan pencari nafkah utama di dalam keluarga, sehingga dituntut untuk bekerja di ranah publik. Karena itu hampir semua laki-laki yang telah mencapai usia kerja terlibat dalam kegiatan ekonomi. Hal ini berbeda dengan perempuan, secara umum masyarakat Indonesia memandang bahwa fungsi pokok perempuan adalah sebagai istri dan ibu. Tugas pokok mereka adalah melaksanakan tugas rumah tangga, seperti melahirkan dan membesarkan anak sehingga tugas pokok mereka lebih diarahkan pada ranah domestik. Selain itu juga tingkat pendidikan perempuan Indonesia yang secara umum rendah sehingga mereka sulit memasuki lowongan pekerjaan yang tersedia. Hal inilah yang mempengaruhi tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan di Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan tenaga kerja laki-laki.

Pada tahun 1986, nampak adanya peningkatan jumlah tenaga kerja perempuan terutama yang ditempatkan pada sektor informal,

yaitu sebanyak 63.281 orang. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan pemerintah yang berupa perluasan kesempatan kerja di luar negeri melalui program AKAN (Antar Kerja Antar Negara). Adanya permintaan tenaga kerja untuk ditempatkan di sektor informal yang cukup besar terutama dari negara-negara di kawasan Timur Tengah, memperluas kesempatan kerja bagi tenaga kerja perempuan.

Sejak tahun 1984, pemerintah Orde Baru mengeluarkan kebijakan perluasan kesempatan kerja di luar negeri melalui program AKAN, lowongan pekerjaan terbuka lebar terutama untuk pekerjaan di sektor informal, yaitu sebagai pembantu rumah tangga. Tidak adanya persyaratan lulusan jenjang pendidikan, memberikan kesempatan tenaga kerja perempuan Indonesia untuk mengisi lowongan kerja tersebut. Pada masa itu mayoritas tenaga kerja perempuan Indonesia tingkat pendidikannya adalah sekolah dasar. Kemudian pada tahun 1985 pemerintah memperluas kesempatan kerja ke Malaysia dan Brunai Darussalam.<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Di tinjau dari sisi pemerintah, kebijakan tersebut berdampak positif, pemerintah dapat memberdayakan tenaga kerja perempuan, mengurangi jumlah pengangguran dan mendatangkan devisa bagi negara. Namun, karena mayoritas tenaga kerja perempuan ditempatkan pada sector informal, yaitu sebagai pembantu rumah tangga, sehingga pekerjaan tersebut sangat rawan akan tindakan kekerasan, Untuk pembahasan lebih lanjut tentang Pengiriman tenaga kerja perempuan, dapat dilihat dari tesis, Nur'aeni Marta, *Pengiriman Tenaga Kerja Wanita Asal Cirebon Ke Saudi Arabia tahun 1984 – 1990*. Fakultas Ilmu Pengetahuan Humaniora, Universitas Indonesia, 2008

Lowongan pekerjaan yang menentukan adanya persyaratan tingkat pendidikan tertentu sangat sulit bagi tenaga kerja perempuan Indonesia untuk mengisi lowongan tersebut. Hal ini karena mayoritas tingkat pendidikan tenaga kerja perempuan Indonesia adalah pendidikan sekolah dasar. Sebagai contoh, pada tahun 1987 tenaga kerja perempuan Indonesia yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil berjumlah 1.034.034 orang, sedangkan tenaga kerja laki-laki yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 2.369.374 yaitu dua kali lipat jumlah PNS perempuan, dan perempuan yang menjadi PNS paling banyak dari lulusan sekolah lanjutan tingkat atas kejuruan (SLTA Kejuruan). Hal ini sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 7. Banyaknya Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 1987**

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah total
	L	P	
Buta huruf	20 166	2 521	22 687
Di bawah SD	67 145	2 910	70 055
Sekolah Dasar	465 871	44 819	510690
SLTP Umum	152 264	40 549	192 813
SLTP Kejuruan	156 818	58 419	214 437
SLTA Umum	270 635	85 174	355 809
SLTA Kejuruan	908 086	653 918	1562 004
Akademi	40 717	10 651	51 368
Sarjana Muda	113 455	46 298	159 753
Sarjana	174 697	88 726	263 423
Lainnya	320	49	369
<b>Jumlah seluruhnya</b>	<b>2369 374</b>	<b>1 034 034</b>	<b>3 403 408</b>

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dikatakan bahwa perempuan

yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah laki-laki yang menjadi pegawai negeri sipil. Wanita yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil yang terbanyak jumlahnya adalah lulusan SLTA Kejuruan yaitu sebanyak 653 918 orang.

Rendahnya tingkat pendidikan mengakibatkan secara umum perempuan yang bekerja sebagai PNS menduduki jabatan rendah. Pada tahun 1987 perempuan yang mempunyai jabatan tinggi sangat sedikit sekali, yaitu sebanyak 37 orang dari jumlah keseluruhan jabatan tinggi pegawai negeri sipil yaitu sebanyak 469, jadi hanya sekitar 7,9% yang menduduki jabatan tinggi secara keseluruhan tersebut. Jumlah perempuan yang terbanyak pada level/tingkat kepangkatan sebagai pengatur muda (IIA), yaitu berjumlah 334.589 orang. Ini jelas membuktikan bahwa tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap partisipasi dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 8: Banyaknya Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan Dan Jenis Kelamin Tahun 1987**

Pangkat/Golongan /Ruang		Laki-Laki	Perempuan	Total
I/a	Juru muda	154.249	12.845	167.094
I/b	Juru muda Tk I	188.373	33.329	221.702
I/c	Juru	136.756	22.828	159.584
I/d	Juru Tingkat I	122.493	16.576	139.069
II/a	Pengatur Muda	543.111	334.589	877.700
II/b	Pengatur Muda Tk I	438.490	272.423	710.913
II/c	Pengatur	279.136	161.913	441.049
II/d	Pengatur TK I	161.332	74.363	235.695
III/a	Penata Muda	164.903	64.381	229.284
III/b	Penata Muda TK I	83.309	23.501	106.810
III/c	Penata	45.370	10.125	55.495
III/d	Piñata TK I	23.896	4.197	28.093
IV/a	Pembina	12.509	1.675	14.182

IV/b	Pembina Tk I	5.322	559	5.881
IV/c	Pembina Utama Muda	3.125	244	3.369
IV/d	Pembina Utama Madya	1.094	66	1.160
IV/e	Pembina Utama	432	37	469

perempuan yang terbanyak pada level/tingkat kepangkatan sebagai pengatur muda (IIA), yaitu berjumlah 334.589 orang. Ini jelas membuktikan bahwa tingkat pendidikan sangat

Pada tahun 1992 jumlah tenaga kerja perempuan yang tidak sekolah berjumlah 11.455.095. Pada tahun 1994 terjadi penurunan jumlah tenaga kerja yang tidak sekolah, yaitu menjadi 10.772.276. Sementara tenaga kerja perempuan yang berpendidikan SD sampai perguruan tinggi menunjukkan adanya peningkatan, walaupun jumlahnya secara keseluruhan lebih sedikit dibandingkan laki-laki.

Kesempatan kerja perempuan Indonesia tahun 1970 sampai dengan tahun 1990 masih didominasi pada sektor informal. Ini ditandai dengan besarnya jumlah yang bekerja dengan status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dengan dibantu anggota keluarga, serta pekerja keluarga. Pada tahun 1990, jumlah kesempatan kerja berjumlah sekitar 75,85 juta yang terdiri dari kesempatan kerja di desa sebesar 57,56 juta dan 18,29 juta. Kesempatan kerja tersebut sebesar 55,9% berada di sektor pertanian.<sup>7</sup> Sehingga kesempatan kerja yang tercipta dalam kurun waktu 1990-1993 dan 1993-1994 masih terkonsentrasi pada daerah pedesaan. Pada kurun waktu 1990-1993 jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang bekerja di sektor pertanian mengalami penurunan.

<sup>7</sup> Departemen Tenaga Kerja RI 1996. *Situasi Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja di Indonesia 1995*. Hlm. 86

Pada tahun 1990, tenaga kerja laki-laki yang bekerja di bidang pertanian sebesar 70,63% , pada tahun 1993 menjadi 66,59% dan terus mengalami penurunan, di tahun 1994 menjadi 61,67%. Sementara tenaga kerja perempuan mengalami penurunan yaitu dari 69,33% di tahun 1990 menjadi 66,06% di tahun 1993 dan tahun 1994 menjadi 62,65%.<sup>8</sup> Secara umum pada kurun waktu 1990-1994 di kota terjadi pergeseran kesempatan kerja di semua sektor. Pergeseran ini diakibatkan oleh adanya pertumbuhan kesempatan kerja di sektor industri perdagangan, dan jasa kemasyarakatan lainnya. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah tenaga kerja perempuan di berbagai bidang, walaupun jumlah secara keseluruhan angka partisipasi perempuan masih dibawah jumlah angka partisipasi tenaga kerja laki-laki.

## E. Kesimpulan

Pendidikan sangat penting bagi keseluruhan anak bangsa, termasuk kaum perempuan. Perempuan merupakan bagian dari masyarakat dan warga negara yang mempunyai peranan penting dalam perkembangan kemajuan suatu bangsa dan negara. Oleh karena pendidikan untuk perempuan tidak boleh diabaikan, kemajuan perempuan hendaknya tidak dilihat sebagai bentuk persaingan untuk menyingkirkan kaum laki-laki, tetapi "perempuan sebagai mitra dalam pembangunan. Tanpa perempuan, pembangunan, khususnya dari segi SDM (sumber daya manusia) tidak bisa optimal.

Secara umum dapat dikatakan bahwa dalam Pembangunan Jangka Pendek (PJP) I, pemerintah Orde Baru telah berhasil meningkatkan kemajuan bagi anak dan remaja dalam

bidang pendidikan. Berdasarkan data-data yang diperoleh penulis, disimpulkan bahwa pendidikan anak dan remaja makin membaik, hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK). Kemajuan tersebut merupakan dampak dari kebijakan dalam bidang pendidikan yang berupa Inpres SD sejak tahun 1973/1974, dan kemudian diperkuat oleh pelaksanaan program wajib belajar 6 tahun sejak tahun 1984.

Pada Pelita II, pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan pemerataan dan perluasan pendidikan bagi seluruh warga Indonesia. Pada tahun 1974 pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 10 tahun 1974 dengan tujuan memperluas kesempatan memperoleh pendidikan baik laki-laki maupun perempuan. Kebijakan pemerataan pendidikan terus ditingkatkan. Pada tahun 1984, pemerintah mengeluarkan kebijakan program wajib belajar 6 tahun, sehingga warga negara Indonesia minimal berpendidikan sampai sekolah tingkat dasar (SD). Pada tahun 1994 program ini diperkuat menjadi program wajib belajar 9 tahun.

Program kebijakan tersebut secara makro berhasil meningkatkan partisipasi perempuan dalam pendidikan. Pada tingkat sekolah dasar (SD), Hampir semua anak, baik laki-laki maupun perempuan masuk sekolah dasar (SD), sehingga dapat dikatakan belum terlihat secara jelas adanya kesenjangan gender. Baru di tingkat sekolah lanjutan pertama (SLTP), mulai ada kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan data-data dari BPS, memperlihatkan adanya kesenjangan gender yang signifikan antara jumlah anak laki-laki dan anak perempuan yang putus sekolah di tingkat SLTP dan sekolah lanjutan. Anak perempuan yang putus sekolah jumlahnya lebih besar dibandingkan

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm.87

anak laki-laki. Kesenjangan gender antara murid laki-laki dan perempuan yang putus sekolah semakin tinggi, terutama pada sekolah lanjutan atas, bahkan sampai perguruan tinggi. Bahkan sampai tahun 2002 kesenjangan tingkat pendidikan antara anak perempuan dan anak laki-laki pada tingkat sekolah lanjutan masih cukup tinggi (lihat data Departemen Pendidikan Nasional, 2002). Ketidaksetaraan pendidikan perempuan dan laki-laki pada masa Orde Baru sangat dipengaruhi oleh faktor struktur sistem masyarakat yang patriarkhis.

Berdasarkan data-data dapat disimpulkan bahwa *stereotif gender* yang menganggap perempuan adalah bukan penghasil nafkah utama keluarga, perempuan hanyalah sebagai *konco wingking*, sehingga peranannya hanya sebagai istri dan pengurus rumah tangga nampak masih sangat kuat di kalangan masyarakat Indonesia. Pandangan seperti ini terefleksikan dalam pendidikan. Orang tua secara umum lebih mengutamakan pendidikan untuk anak laki-lakinya dibanding anak perempuannya. Kondisi ini mempengaruhi partisipasi perempuan dalam pendidikan, sehingga pada masa Orde Baru terutama periode tahun 1970-an sampai 1980-an bahkan sampai tahun 1990 perempuan yang berpendidikan tinggi relatif lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin sedikit jumlah perempuan yang mengenyam pendidikan tersebut. Tingkat pendidikan perempuan yang rendah ini mempengaruhi tingkat partisipasi perempuan dalam dunia kerja.

Tingkat pendidikan perempuan yang mayoritas rendah, mengakibatkan kualitas tenaga kerja perempuan Indonesia secara umum rendah. Akibat tingkat pendidikan perempuan yang rendah, sehingga tenaga kerja perempuan sulit untuk

menduduki lowongan kerja yang 'baik'. Selain itu kesempatan kerja mereka pun sangat terbatas. Dan secara umum tenaga kerja perempuan Indonesia antara tahun 1970-1998 terserap pada sektor informal. Peningkatan partisipasi tenaga kerja perempuan Indonesia terjadi terutama sejak tahun 1984, dengan adanya kebijakan pemerintah Indonesia untuk memperluas kesempatan kerja ke luar negeri pada sektor informal. Dengan demikian tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi kesempatan seseorang dalam persaingan di pasar kerja.

Rendahnya tingkat pendidikan, mengakibatkan kedudukan perempuan dalam masyarakat termarginalkan, baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik. Untuk itu, perlu dilakukan pemahaman bagi seluruh masyarakat Indonesia agar memberikan kesempatan yang sama pada anak perempuannya untuk mengenyam pendidikan sebagaimana anak laki-lakinya. Karena melalui pendidikan pula, bangsa Indonesia mampu mencapai cita-citanya, yaitu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. "Pendidikan adalah kekuatan", maka Bangsa Indonesia akan segera terbebas dari kebodohan dan kemiskinan serta menjadi bangsa yang unggul pada kompetisi global. Perempuan sebagaimana laki-laki merupakan bagian dari masyarakat dan warga negara, sehingga peranannya sangat dibutuhkan untuk kemajuan bangsa.

#### **Daftar Pustaka:**

##### **Sumber Arsip**

Jumlah Tenaga Kerja Perempuan Indonesia Yang Terserap Di Lapangan Pekerjaan

Jumlah Tenaga Kerja Perempuan Yang Bekerja Di Luar Negeri

Jumlah Angkatan Kerja Perempuan  
Indonesia

*Peningkatan kualitas SDM melalui Pendidikan dan Kebudayaan. Himpunan Sari Pidato, Sambutan, dan pengarahannya Terpilih. Menteri pendidikan dan kebudayaan Prof. Dr. ing. Wardiman Djojonegoro.* Departemen pendidikan dan kebudayaan, 1998

*Statistik Indonesia :Statistical Year Book of Indonesia, 1983.* Jakarta: Biro Pusat Statistik Indonesia, 1983

*Statistik Indonesia :Statistical Year Book of Indonesia, 1987.* Jakarta: Biro Pusat Statistik Indonesia, 1987

### **Sumber Buku**

Bahir, Zainab ed., *Angkatan Kerja di Indonesia: Partisipasi, Kesempatan dan Pengangguran.* Jakarta: CV Rajawali, 1984

Bridget Somekh & Cathy Lewin, *Research Methods in The Social Sciences.* London: Sage publications, 2005

Departemen Penerangan RI, *Perjuangan Wanita Indonesia 10 windu setelah Kartini 1904-1984.* Departemen Penerangan RI, 1984

Departemen Tenaga Kerja RI, *Situasi Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja di Indonesia 1995.* Jakarta: Departemen Tenaga Kerja, 1996.

Handayani, Trisakti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender.* Malang: UMM Pers, 2002

Hill, Hal, *Transformasi Ekonomi Indonesia Sejak 1966: Sebuah Studi Kritis dan Komprehensif,* Terjemahan Tim PAU UGM, Jogjakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1996

Patricia Madoo Lengerman, *Teori Feminis Modern dalam Teori Sosiologi Modern* George Ritzer -  
Douglas J Goodman, Jakarta: PT. Gramedia,  
2007